

Judul : Kampus kedokteran baru: komisi IX dukung biaya kuliah gratis
Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kampus Kedokteran Baru Komisi IX Dukung Biaya Kuliah Gratis

SENAYAN mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membangun kampus kedokteran baru sebagai langkah strategis memperkuat sistem kesehatan nasional. Kebijakan itu harus diarahkan pada akses terbuka dan mutu pendidikan dokter.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, pembangunan kampus kedokteran tidak boleh dimaknai sekadar proyek fisik semata. Kebijakan itu harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil tenaga medis sekaligus memperluas akses pendidikan dokter bagi seluruh anak bangsa.

"Kami mendukung penuh rencana itu. Tapi prinsipnya harus jelas, pendidikan dokter harus terbuka untuk siapa pun, bukan hanya bagi mereka yang mampu secara ekonomi," ujar Nihayatul di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Kata dia, selama ini biaya kuliah fakultas kedokteran yang sangat tinggi jadi penghalang utama lahirnya dokter-dokter berkualitas. Banyak anak bangsa dengan kapasitas akademik memadai terpaksa tersingkir karena keterbatasan ekonomi semata.

"Jangan sampai kampus kedokteran baru justru mengulang persoalan lama. Biaya mahal adalah tembok penghalang utama, dan negara harus hadir untuk merobohkannya," tegas legislator PKB itu.

Selain soal akses, dia juga menyoroti pentingnya menjaga mutu pendidikan kedokteran di seluruh kampus baru yang akan dibangun Pemerintah. Peningkatan kuantitas dokter tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas lulusan.

"Karena itu, pengajar harus unggul, kurikulum harus relevan, dan lulusan harus benar-

benar siap melayani rakyat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar," tegas ketua DPP Perempuan Bangsa itu.

Dia mengingatkan agar semangat membangun kampus kedokteran baru tidak membuat Pemerintah melupakan fakultas kedokteran yang sudah ada. Banyak fakultas kedokteran eksisting masih menghadapi keterbatasan sarana, SDM, dan dukungan anggaran.

Komisi IX akan mendorong kebijakan ini agar berjalan adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik. "Ini momentum untuk melakukan koreksi sistemik. Kalau negara serius membangun kesehatan nasional, maka keberpihakan pada akses dan kualitas adalah kuncinya," ucapnya.

Senada, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengingatkan Pemerintah agar penambahan fakultas kedokteran tidak mengorbankan mutu pendidikan dokter. "Menambah program studi kedokteran harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita hanya mengejar jumlah, tetapi kualitas dokter dan layanan kesehatan justru terabaikan," ujar Edy.

Dia menyampaikan, pembangunan fakultas kedokteran baru bukan perkara instan, karena membutuhkan ekosistem pendidikan yang lengkap dan mahal. "Ini bukan sekadar membuka program studi, melainkan juga membangun ekosistem pendidikan kedokteran yang kompleks dan mahal," kata politikus PDIP itu.

Edy mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 279 ribu dokter teregistrasi untuk melayani sekitar 287 juta penduduk. Secara nasional rasio dokter mendekati standar minimal, tapi memang masih ada ketimpangan distribusi. ■ **PYB**